

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem atau perpaduan dari berbagai aturan dan aspek serta mekanisme yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menyalurkan atau mengalokasikan seluruh kekayaan atau sumber daya milik negara yang ada kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara yang adil dan merata. Meskipun dalam kenyataannya tujuan tersebut masih belum bisa direalisasikan dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi menimbulkan banyak masalah seperti yang marak terjadi yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tak pernah ada habisnya, serta masalah hukum yang sulit berjalan, dan monopoli dalam kegiatan ekonomi yang di mana berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat buruk. Suryana (2017)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ruspina (2013) menjelaskan dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walau anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas dasar kualitas pelayanan yang diberikan.

Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Padahal aparatur pemerintah merupakan orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan rakyat, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang dalam mencapai tujuan. Salah satu tugas pemerintah dalam kewajibannya adalah membuat rencana pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran Muhammad Kurniawan (2002).

Fenomena yang berkembang yang sering terjadi saat ini adalah terjadinya krisis di segala bidang dan adanya tuntutan ekonomi daerah serta korupsi, kolusi dan nepotisme; untuk terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan good governance yang ditandai adanya tiga pilar utama, yaitu: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik juga dibutuhkan faktor suatu komitmen organisasi anggaran yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran. Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan

disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi Dedi(2007). Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika semua pihak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, semakin tinggi tingkat keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja.

Menurut Siagian (2002), banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Salah satunya adalah komitmen organisasi. Hal ini mengingat karena beberapa faktor tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Maka dari itu dibutuhkan komitmen organisasi untuk mewujudkannya. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2011), menunjukkan bahwa kredibilitas yang tinggi mampu menghasilkan suatu komitmen, dan hanya dengan komitmen yang tinggi, suatu organisasi mampu menghasilkan kinerja yang baik.

Faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada kinerja aparatur pemerintah daerah selain kedua faktor diatas adalah kompensasi. Terdapat opini bahwa kecenderungan kecurangan didalam kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis Soepardi (2007). Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat

dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan, salah satu yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Adapun fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Kompensasi merupakan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi Simamora(2004). Menurut Panggabean dalam Dito (2010), kompensasi seringkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Dengan kompensasi yang sesuai kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan

kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul tentang “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di OPD Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor yang mendukung dalam masalah diharapkan dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Pemda Kota Padang. Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di OPDkota Padang ?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di OPDkota Padang ?
3. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di OPDkota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah OPD dikota Padang.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Keuangan Daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah OPD dikota Padang.
3. Pengaruh Kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di OPDkota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharap dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Pemda kota Padang.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharap penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah kota Padang dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal kinerja pemerintah daerah agar dapat lebih terus ditingkatkan.

3. Bagi Pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan dan Penelitian selanjutnya di kabupaten atau kota lain di seluruh Indonesia, dan kegunaan tersebut dapat berdampak baik bersifat praktis maupun teoritis.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab:

1. Bab pertama Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- 2 Bab kedua Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, dalam bab ini akan dibahas mengenai kinerja aparatur pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, dan kompensasi di organisasi pemerintah daerah kota Padang.
- 3 Bab ketiga Metodologi Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai populasi, sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, pengukuran variabel, model penelitian, hipotesis dan teknik hipotesis.
- 4 Bab empat merupakan analisis hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang prosedur pengambilan sampel, demografi responden, statistik deskriptif, hasil pengujian instrumen data, hasil pengujian validitas, hasil pengujian reliabilitas, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian normalitas, hasil pengujian multikolinieritas dan hasil uji hipotesis.
- 5 Bab lima merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.